



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan Pengguna Arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencegah terjadinya penyalagunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu diatur Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang di hasilkan dan mengelompokkannya.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan Negara, Masyarakat dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemerintahan.
13. Biasa/terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan Bangsa.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, Sumber Daya Nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi Lembaga/Organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
17. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang keterbukaan informasi publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalagunaan dan kepentingan yang tidak sah.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi yang dikecualikan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruanglingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

- b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbedadalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas sebagai berikut:
- a. 000 umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.

BAB III
PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri:
 - a. pengguna internal yang ada di Instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar Instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pimpinan Tingkat Tertinggi yaitu Kepala Perangkat Daerah/Instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala bidang, Kepala sub bagian, Kepala seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak di berikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. Pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bagian, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak di berikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- b. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, Arsiparis dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, Pimpinan level tinggi Pimpinan level menengah dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. publik yang berhak mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. Aparat Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. lampiran I kode angka 000 bidang tugas umum;
- b. lampiran II kode 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;

- e. lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian; dan
- j. lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan padarak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau Petugas Kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

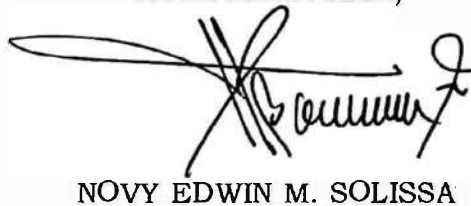


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUMDAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. KODE ANGKA 000 BIDANG TUGAS UMUM

I. UMUM						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	LAMBANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten				
	002	Penghargaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya				
	003	Hari Raya / Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan-Idul Fitri-Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan - Ucapan Terima Kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	005	Undangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan -Pamong Praja -Tanda Pengenal -Pejabat Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas -Tanah untuk rumah dinas -Perabotan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess/ Guest House	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/ Faximili/ Internnet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan/ Ketertiban Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	019	Protokol -Upacara Bendera -Tata tempat -Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden -Audiensi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		-Alamat-alamat Kantor dan Pejabat -Sambutan				
3	020	PERALATAN -Penawaran, Ekspose	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	023	Pejabat Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	026	senjata	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	030	Kekayaan Daerah				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

5	040	Perpustakaan/Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi				
	041	Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi -Foto -Audio -Video	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan -Pola Klasifikasi -Penataan Berkas -Penyusutan Arsip -Pembinaan Kearsipan - -Pemeliharaan/ Perawatan Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi -Peralatan -Sistem Sumber Daya Manusia Pembinaan dan Persandian	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN -REPELITA -Pelita Daerah -Bantuan -Pembangunan Daerah -Bappeda -Perencanaan/ Proyek bidang perlatan -Bidang Perpustakaan -Bidang Kearsipan -Bidang Sandi -Organisasi/Ketata laksanaan -Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag.
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

	052	Bidang Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	057	Bidang Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah -Susunan dan tata kerja -Tata tertib kantor, jam kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	065	Ketatalaksanaan/ tata naskah/ Sistem	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	068	Komputerisasi/ Siskomendagri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	072	Survey	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	073	Kajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	075	Departemen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	076	Non Departemen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	077	Provinsi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

	078	Kabupaten/ Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	079	Kecamatan/ Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	082	Bupati/ Walikota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	086	Internasional di dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

	094	Perjalanan Pegawai, termasuk Pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang teknis

7 BUPATI KEPULAUAN ARU, 8



JOHANGONGA

II. KODE 100 BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN

II. PEMERINTAHAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1	2	3	4	5	6	7
1	130	PEMERINTAH KABUPATEN				
	131	Bupati				
		-pencalonan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Memori Kepala Daerah,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	131	Sambutan/ Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati meliputi				

		-Pencalonan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-serah Terima Jabatan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah Kabupaten Meliputi				
		-Pencalonan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum BAN (Badan Anggaran Nasiona)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Kabupaten	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	139	laporan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

2	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	141	Pamong Desa,meliputi: Pencalonan,Pemilihan, Meninggal,Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/ Kelurahan,Dewan Marga,Rembug Desa/Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/perluasan Desa/Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jaringan klasifikasi di sini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kepala Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD KABUPATEN/ KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan -Reses	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM				
		Konstitusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja	
		Undang-undang Dasar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Utang/piutang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Gadai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Hipotik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Notariat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Batuan hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	184	Hukum internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pasport	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Exit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lintas batas/ batas antar negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Rumah tahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	188	Peraturan perundang-undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Bupati/Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	197	Kerjasama dengan lembaga asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHAN GONGA

III. KODE ANGKA 200 BIDANG TUGAS POLITIK

III. POLITIK						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan umum - Orde Baru - Revormasi 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja.	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN Meliputi: Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Keuangan - Parpol - Rapat Koordinasi Konsolidasi 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

2	220		ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	-	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang tentangan perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjuangan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unut kerja	Bidang Teknis
	222	-	Berdasarkan Kekayaan Kekayaan Pepabrik Kekayaan wredalama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	-	Berdasarkan kerohania	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	-	Lembaga adat	Terbata	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	230		ORGANISASI PROFESIDAN FUNGSIONAL				

231	-	Ikatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
232	-	Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
233	-	Persatuan serjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis
234	-	Persatuan advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat menngganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
235	-	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	236	- Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	237	- Persatuan wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	238	- Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	239	- Organisasi dan Fungsi Lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	- Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unit kerja	
	242	- Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	- Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	- Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURU, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN				
	251	- Organisasi Buru Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	252	-	Organisasi Buru Nasinal	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	-	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	254	-	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	-	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260		ORGANISASI WANITA				
	261	-	Dharma Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unit kerja	
	262	- Persatuan Wanita Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	263	- Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	- Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	- Pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	- Nomor urut Partai/Tanda Gambar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

					pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
273	-	Kampanye/ Dana	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
274	-	Petugas Pemilu	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
275	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
276	-	S a r a n a - Sarana TPS - Sarana kendaraan - Surat Suara - Kotak Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	277	- Pengumuman suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsidan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	278	- Pengambilan Sumpa / janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	280	PILKADA				
	281	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	282	Nomor Urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	283	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unit kerja	
284	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
285	Pemilih/Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
286	<ul style="list-style-type: none"> - SARANA - Sarana TPS - Sarana Kendaraan - Surat Suara - Kotak Suara 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
287	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
288	Pengambilan Sumpah / Janji anggota MPR, DPR, DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis	

						pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
9	290		KOMISI PEMILIHAN UMUM / BAWASLU				
	291	-	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHANGONGA

IV. KODE ANGKA 300 BIDANG TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN /KETERTIBAN				
	301	- Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	- PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	- Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	- PPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

						pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
2	310	PERTAHANAN					
3	311	-	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang, Seksi, Subag
	312	-	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	313	-	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	314	-	Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN					
	321	-	Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	322	-	Wajib Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

						Kabupaten Kepulauan Aru	
	323	-	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	324	-	Kekayaan ABRI / TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	325	-	Pejabat Sipil dari ABRI / TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI / TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
4	330		KEAMANAN				
	331	-	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	332	-	Huru hara / demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	333	-	Senjata api / Senjata tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis

	334	-	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	335	-	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	336	-	Surat surat kalenng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	-	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaa fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	338	-	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaa fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
5	340	-	PERTAHANAN SIPIL.				
	341	-	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang teknis

						kinerja	
6	350		KEJAHATAN				
	351	-	Makar/ Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	352	-	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	353	-	Penganiayaan ,Pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	354	-	Subversi/ Peny enludupan/N arkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	355	-	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Bidang Teknis
	356	-	Korupsi/penye lewengan/peya lahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	357	- Perkosaan/ Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	- Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	- Kejahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	Bencana				
	361	- Gunung Berapa / gempa	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	- Banjir dan / tanah longsor	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	- Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

			instalasi - Antisipasi - Proteks, APAR - Kebutuhan sarpras				
	365	-	Kekeringan	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	-	Tsunami	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	370		KECELAKAAN SAR	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	-	Darat	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	-	U d a r a	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	-	L a u t	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	374	-	Sungai/ danau	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

9 BUPATI KEPULAUAN ARU, 8


JOHANGONGA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Kesejahteraan Rakyat				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	405	Jamkeso/ Jamkesda	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
	a	Swadaya Gotong Royong	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Penataan gotong royong 2 Gotong royong dinamis 3 Gotong royong statis 4 Pungutan				
	b	Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Pembinaan, 2 Klasifikasi, 3 Proyek, 4 Musyawarah desa				
	c	Latihan Kerja Masyarakat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Kader masyarakat, 2 Kuliah Kerja Nyata (KKN), 3 Pusat latihan, 4 Kursus - kursus, 5 Kurikulum / syllabus, 6 Ketrampilan, 7 Pramuka				
	d	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	e	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	f	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Program, 2 Pembinaan organisasi, 3 Kegiatan				
	g	Penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Publikasi, 2 Peragaan, 3 Sosio drama 4 Siaran pedesaan, 5 Penyuluhan lapangan				
	h	Kelembagaan desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Kelompok tani, 2 Rukun tani, 3 Subak 4 Dharma tirta				
		PEREKONOMIAN DESA				
	a	Produksi desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Pengolahan 2 Pemasaran				
	b	Keuangan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Perkreditasi desa, 2 Inventarisasi data, 3 Perkembangan / pelaksanaan 4 Bantuan/ stimulasi 5 Petunjuk / pembinaan pelaksanaan				

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah				
1	2	3	4	5	6	7				
412	c	Koperasi Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis				
		1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2 Koperasi Unit Desa (KUD)								
		d	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
			1 Jumlah desa yang diberi bantuan, 2 Pengarahannya 3 Pusat 4 Daerah							
			Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka				Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
			1 Pusat 2 Daerah							
		f	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
1 Bantuan langsung, 2 Bantuan keserasian, 3 Bantuan juara lomba desa										
g	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis					
	Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)									
413	a	PRASARANA DESA								
		Prasarana Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis				
		1 Pembinaan 2 Bimbingan teknis								
		b	Pemukiman kembali penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
			1 Lokasi, 2 Diskusi, 3 Pelaksanaan							
		c	Masyarakat Pradesa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
1 Pembinaan, 2 Penyaluhan										
d	Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis					
	1 Rumah sehat, 2 Proyek perintis, 3 Pelaksanaan, 4 Pengembangan, 5 Rehabilitasi kampung									
414	a	PENGEMBANGAN DESA								
		Tingkat Perkembangan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis				
		1 Jumlah desa, 2 Pemekaran desa, 3 Pembentukan desa baru, 4 Evaluasi, 5 Rancangan								
		b	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
			1 Penyuluhan program, 2 Lokasi UDKP, 3 Pelaksanaan, 4 Bimbingan / pembinaan 5 Evaluasi							
		c	Tata Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis			
1 Inventarisasi, 2 Penyusunan pola tata desa, 3 Aplikasi tata desa, 4 Pemetaan, 5 Pedoman pelaksanaan, 6 Evaluasi										
d	Perlombaan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis					
	1 Pedoman, 2 Penilaian, 3 Kejuaraan, 4 Pijakan									
415	a	KOORDINASI								
		Sektor Khusus	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis				
		Berkas tentang koordinasi sector khusus di								
b	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis					
	Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal									

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	
	415	c Tim koordinasi pusat (TKP) Berkas tentang tim koordinasi pusat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		d Kerjasama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Luar negeri (UNICEF), 2 Perguruan tinggi, 3 Departemen / lembaga non departemen					
3	420	PENDIDIKAN SEKOLAH					
	421	a Pra Sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		b Sekolah Dasar / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		c Sekolah Menengah / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		d Sekolah Tinggi/ Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		e Sekolah Kejuruan / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		f Kegiatan sekolah, Dies Natalis, Lusturnm	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		g Kegiatan Pelajar	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Reuni, darmawisata, 2 Organisasi siswa intra sekolah (OSIS), 3 Pelajar teladan, dan 4 Resimen mahasiswa (MENWA)					
		h Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		i Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH					
		a Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, mapras, perlengkapan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		b Tahun Pelajaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		c Hari Libur	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		d Ulang sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		e Beasiswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		f Biaya operasional sekolah (BOS)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	423	METODE BELAJAR					
		a Kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		b Ceramah, Simposium	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		c Diskusi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		d Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Study Tour	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		e Kurikulum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		f Karya Tulis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		g Ujian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	424	TENAGA PENGAJAR					
		Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector, dan guru teladan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	425	SARANA PENDIDIKAN					
		a Gedung	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Gedung Sekolah 2 Kampus 3 Pusat Kegiatan Mahasiswa					
		b Buku	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		c Perengkapan Sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		Berkas tentang perlengkapan sekolah					

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Tingkat Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	426	KEOLAHRAGAAN				
		a Cabang Olah Raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Sarana	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Gedung olah raga 2 Stadion 3 Lapangan 4 Kolam renang				
		c Pesta Olah Raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
d KONI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
427	KEPEMUDAAN	Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelandang remaja	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
428	KEPRAMUKAAN		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPAGRI		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	KESENIAN				
	a Cabang Kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	b Sarana	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	Berkas tentang gedung kesenian					
	432	KEPURBAKALAN				
	a Museum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	b Peninggalan Kuno	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	1 Candi, termasuk pemugaran 2 Benda peninggalan kuno					
	433	SEJARAH	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
434	BAHASA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN	Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
436	KEPERCAYAAN	Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	PEMBINAAN KESEHATAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	a Gizi b Mata c Jiwa d Kanker e Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) f Perawatan g Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) h Pekan Imunisasi Nasional					
	OBAT - OBATAN					
	442	a Pengadaan b penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	443	PENYAKIT MENULAR				
		a pencegahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung (P2MGL)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Kusta 2 Kelamin 3 Framboesia 4 TBC/AIDS/HIV				
		c Epidemiologi dan karantina (Epidka)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
1 Kholera 2 Imunisasi 3 Surveilance 4 Rabies/anjing gila, Antraks						

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
443	d	Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang (P2B)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Malaria 2 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3 Filaria 4 Serangga				
443	c	Hygiene Sanitasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Tempat- tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 2 Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3 Pestisida				
444	a	GIZI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Kekurangan Makanan c Bahaya Kelaparan, Busung Lapar d Keracunan Makanan e Menu Makanan Rakyat f Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) g Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)				
445		RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
446		TENAGA MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
447		ALAT MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
448	a	PENGOBATAN TRADISIONAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Pijat c Tusuk Jarum d Jamu Tradisional/Hertal e Dukun/Paranormal				
6	450	AGAMA				
450	a	Peribadatan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Sholat 2 Zakat, Fitrah 3 Puasa 4 MTO				
450	b	Rumah Ibadah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
450	c	Tokoh Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
450	d	Pendidikan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		1 Tinggi 2 Menengah 3 Dasar 4 Pondok Pesantren 5 Gedung Sekolah 6 Tenaga Pengajar 7 Buku 8 Dakwah 9 Organisasi/Lembaga Pendidikan 10 TP A/T O A/TP O				
450	e	Harta Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
450	f	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
450	g	Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				
450	h	Mazbah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
452	a	KRISTEN PROTESTAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Peribadatan c Rumah Ibadah d Tokoh Agama, Rohaniawan e Pendeta, Domine f Mazhab Organisasi Gerejani				
453	a	KATHOLIK	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		b Peribadatan c Rumah Ibadah d Tokoh Agama, Rohaniawan e Pendeta, Domine f Mazhab Organisasi Gerejani				

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	454	HINDU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Peribadatan				
		b Rumah Ibadah c Tokoh Agama d Mazha b e Organisasi Keagamaan				
1	455	BUDHA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Peribadatan				
		b Rumah Ibadah c Tokoh Agama d Mazha b e Organisasi Keagamaan				
1	456	URUSAN HAJI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a ONH				
		b Umroh c Manasik				
7	460	SOSIAL				
1	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Cacat mata				
		b Cacat tubuh c Cacat mental d Bisu tula				
1	462	TUNAS SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Gelandangan				
		b Pengemis c Tunas Susila d Anak Nakal/Anak Jalanan				
1	463	KESEJAHTERAAN ANAK/ KELUARGA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Anak Putus Sekolah				
		b Ibu Teladan c Keluarga Sakinah d Anak Asuh				
1	464	PEMBINAAN PAHLAWAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Pahlawan				
		b Penerima Kemerdekaan c Cacat Veteran				
1	465	KESEJAHTERAAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Lanjut usia				
		b Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi				
1	466	SUMBANGAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Korban Bencana				
		b Pencarian Dana Untuk Sumbangan c Panti Asuhan d Panti Jompo				
1	467	BIMBINGAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemukiman untuk masyarakat				
1	468	PMI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
1	469	MAKAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Umum				
		b Pahlawan c Khusus Keluarga Raja d Remotrium				
8	470	KEPENDUDUKAN				
1	471	PENDAFTARAN PENDUDUK		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		a Identitas penduduk	Terbatas			
		1 Biodata 2 Nomor Induk Kependudukan 3 Kartu Tanda Penduduk 4 Kartu Keluarga 5 Advokasi Identitas Penduduk				
b Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
1 Perpindahan penduduk WNI						
2 Perpindahan penduduk WNA 3 Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4 Daerah terbelakang 5 Bedol desa						

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	
471	c	Perpindahan penduduk antar Negara	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Penduduk Indonesia keluar negeri 2 Orang asing tinggal sementara 3 Orang asing tinggal tetap 4 Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (melintas batas tradisional)					
471	d	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Akibat bencana alam 2 Akibat kerusuhan sosial 3 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4 Pendaftaran penduduk rentan					
472	a	PENCATATAN SIPIL					
		Kelahiran, kematian, dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Kelahiran 2 Kematian 3 Advokasi kelahiran dan kematian 4 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi					
		Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
	c	Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Pengangkatan anak 2 Pengakuan anak 3 Pengesahan anak 4 Perubahan akta 5 Pembatalan akta 6 Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta					
d	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
	1 Akibat perkawinan 2 Akibat kelahiran 3 Non perkawinan 4 Non kelahiran 5 Perubahan WNI ke WNA 6 Perubahan WNA ke WNI						
473	a	INFORMASI KEPENDUDUKAN					
		Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Perangkat keras 2 Perangkat lunak 3 Jaringan komunikasi data					
	b	Kelembagaan dan sumber daya informasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1 Daerah maju 2 Daerah berkembang 3 Daerah terbelakang					
	c	Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
1 Pendaftaran Penduduk 2 Kejadian vital penduduk 3 Penduduk non registrasi							
d	Pelayanan Informasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
	1 Media elektronik 2 Media cetak 3 Outlet						
474	a	PERKEMBANGAN PENDUDUK					
		Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
474	b	1 Struktur jumlah 2 Komposisi 3 Fertilitas 4 Kesehatan reproduksi 5 Morbiditas penduduk 6 Mortalitas penduduk					
		Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
474	c	1 Anak dan remaja 2 Penduduk usia produktif 3 Penduduk lanjut usia 4 Gender					

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Ilak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	
	474	Penataan Persebaran Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		c	1 Migrasi antar wilayah				
			2 Migrasi internasional				
			3 Urbanisasi				
			4 Sementara				
			5 Migrasi non permanen				
	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
	d	1 Pengembangan sistem perlindungan penduduk					
		2 Pelayanan kelembagaan ekonomi					
		3 Pelayanan kelembagaan sosial budaya					
		4 Partisipasi masyarakat					
	Perkembangan Wawasan Kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
c	1 Pendidikan jalur sekolah						
	2 Pendidikan jalur luar sekolah						
	3 Pendidikan jalur masyarakat						
	4 Pembangunan berwawasan kependudukan						
475	PROYEKSI DAN PENYERASIAN						
	a	Indikator Kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan				
			2 Pemanfaatan indikator kependudukan				
	3 Sosialisasi indikator kependudukan						
	b	Proyeksi Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan				
	2 Pemanfaatan proyeksi kependudukan						
	c	Analisis Dampak Kependudukan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan				
2 Pemanfaatan analisis dampak kependudukan							
d	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
	1	Lembaga internasional					
		2 Lembaga masyarakat dan nirlaba					
3 Lembaga usaha swasta							
c	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
	1	Lembaga pemerintah					
2 Pemerintah provinsi dan kota							
3 Pemerintah kabupaten							
f	Analisis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
		Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan					
476	MONITORING	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
477	EVALUASI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
479	KELUARGA BERENCANA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis		
9	480	MEDIA MASSA					
481	481	PENERBITAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	Burat kabar				
			2 Majalah				
			3 Buku				
			4 Penerjemahan				
			5 Buletin				
			6 Jurnal				
			7 Kliping				
482	482	RADIO	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	RRI				
			2 NonRRI				
			3 Radio luar negeri				
4 Radio internet							
483	483	TELEVISI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis	
		1	TVRI				
			2 Swasta local, nasional				
			3 Luar negeri				
4 Televisi internet							

No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
484	FILM		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
485	PERS		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	1 Kewartawanan 2 Wawancara 3 Informasi nasional					
486	GRAFIKA		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang grafika/ cetak buku				
487	PENERANGAN		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang pameran non komersial				
488	OPERATION ROOM		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang operation room terkait media				
489	HUBUNGAN MASYARAKAT		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang hubungan masyarakat terkait				

9 BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHAN GONGGA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan
 dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

VLPEREKONOMI						
No	Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN - Davan Stabilitasasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	501	PENGADAAN PANGAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	502	PENGADAAN SANDANG	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA - Promosi perdagangan - Pekan raya - Gotong royong statis - Iklan - Pameran/Ekspo komersial - Pelelangan - Teru/ timbang - Ulang / kalibrasi	Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa/ Terbuka Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	511	Pemasaran - Sembilan bahan pokok - Pasar tradisional - Pasar modern - Pertokoan, kaki lima, kios	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	512	EKSPOR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	513	IMPOR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	516	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORENG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	518	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	520	PERTANIAN				
3	521	Tanaman Pangan - Program - Bimas/Inmas termasuk kredit - Penyuluhan - Produksi - Padi/Panen - Pakwija - Jagung - Ketek pohon/Ubi - ubian - Hortikultura - Sayuran / Buah - buahan - Tanaman hias - Pembudidayaan rumput Laut - Saran usaha pertanian - Peralatan - Pembibitan - Pupuk - Perlindungan tanaman - Penyakit, penyakit daun, penyakit - Hama - hama serangga, wereng, - Pemberantasan hama meliputi:	Biasa / Terbuka Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

4	530	- Perindustrian - Undang – undang gangguan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	531	- Industri logam	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	532	- Industri mesin/Elektronik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	533	- Industri kimia/farmasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	534	- Industri kimia/farmasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	- Industri makanan / minuman	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	- Aneka industry / perusahaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	- Aneka kerajinan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	- Usaha Negara / BUMN - Perusahaan jawatan - Perusahaan umum - Persero / PT, CV, UD, Firma	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	- Perusahaan daerah / BUMD	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	540	Pertambangan / kesamudraan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN				
	541	- BBM	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	- Gas Bumi - Eksploitasi / pengeboran - Kontrak kerja - Pengolahan tangki, pompa Tengker	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	543	- Logam Mulia - Emas - Intan / Batu mulia - Perak	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	544	- Logam - Timah - Aluminium, Bauxit - Besi, termasuk besi tua - tembaga	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	545	- Aneka tambang - Batu bara	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	546	- Geologi - Vulkanologi - Pengawasan gunung berapi - Sumur artesis, air bawah tanah	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	547	- Hidrologi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	548	- Kesamuderaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6		PERHUBUNGAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	550	- Perhubungan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	551	- Perhubungan darat - Lalulintas jalan raya, sungai, danau - Keamanan lalulintas, rambu – rambu - Angkutan jalan raya - Perizinan - Alat angkutan - Terminal - perkeretaapian	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	554	- Pos	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	555	<ul style="list-style-type: none"> - Telekomunikasi - Telepon, Hp - Telegram - Telex/SBB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi 	Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	556	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata dan Rekreasi - Objek Kepariwisataa - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat Sejarah / Monumen 	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	557	<ul style="list-style-type: none"> - Meteorologi - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang 	Biasa/ Terbuka Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		TENAGA KERJA				
7	560	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kerja - Pengangguran 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	<ul style="list-style-type: none"> - Upah 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	562	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan/ kesamudraan 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	563	<ul style="list-style-type: none"> - Latihan Kerja / Magang 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	564	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya 	Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	565	<ul style="list-style-type: none"> - Pertelesihan Pertubuan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	566	<ul style="list-style-type: none"> - Keselamatan Kerja 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	567	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutusan Hubungan Kerja 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan Buru (Kesetaraan, Perumahan, dll) 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Orang Asing 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
		PEMBAKARAN/ MONETER				
8	570	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Domestik 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	572	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Asing 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Patungan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Uang dan Modal 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	575	<ul style="list-style-type: none"> - Saham 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
9	580	<ul style="list-style-type: none"> - Perbankan / Moneter 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	<ul style="list-style-type: none"> - Deposito 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	584	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Pembangunan Daerah 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	- Pemulihan Hak (PerPres 4 / 1960)	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Pengelolaan	Terbatas	Eselon III		
	- PN Perumnas, Bonded Bare House, Industrial Estate, Real Estate	Terbatas	Eselon III		
	- Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan	Terbatas	Eselon III		
	- Sengketa Tanah				
	- Peradilan Perkara Tanah (Lihat Klasifikasi 183)				
	- Pencabutan dan Pembebasan Tanah				
	- Pencabutan Hak				
	- Pembebasan tanah				
	- Ganti Rugi Tanah				

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGGA